

TAJUK RENCANA

Sabtu Malam di Malioboro

SABTU (6/6) malam dan Minggu paginya, Malioboro dan sekitarnya memang luar biasa riuh. Ratusan kendaraan yang mayoritas pesepeda, pejalan kaki bergerombol di sepanjang landmark Yogyakarta. Di titik nol, seperti ada 'fun bike', para pesepeda ber-cengkerama. Mengingat kembali ke masa normal sebelum ada Covid-19.

Menjadi masalah, karena warga yang bercengkerama tersebut tidak semua memakai masker. Gubernur DIY Sultan HB X memang sengaja melewati Malioboro. Itulah sebabnya mengapa geram, dan mengancam akan menutup Kawasan Malioboro bila warga tidak tertib dalam protokol kesehatan.

Kegeraman Sultan HB X itu wajar, karena ternyata tidak semua mematuhi protokol kesehatan. Apalagi dilakukan di kawasan wisata Malioboro. Jalan legendaris tersebut siapa yang tak mengenali? Mudah-mudahan tidak ada dampaknya, namun akan menjadi musibah jika berakibat ada yang terkena kasus baru di masa pandemi Covid-19. Bukan hanya tracing akan sulit, sebab yang datang di Malioboro tersebut bukan hanya warga DIY, namun banyak juga yang dari luar kota.

Dampak berikutnya yang tentu saja tak diharapkan, adalah sangat mungkin menjadi kluster baru yang tentu jadi stigma negatif, karena pasti akan terkesan kurang baik. Kluster yang kemudian dihubungkan dengan Malioboro, area dari kehidupan ekonomi ribuan warga. Apalagi belum lama Gubernur DIY sudah menyatakan komunitas PKL Malioboro diperbolehkan membuka lapaknya.

Sebenarnya hari Minggu bukan hanya Malioboro, namun sejumlah pantai di Yogya juga sudah mulai didatangi pengunjung. Baik pantai selatan di wilayah Bantul, Gunungkidul atau Kulon-

progo. Meski pembekal setempat belum membuka resmi namun masyarakat sudah berdatangan.

Seperti dinyatakan dalam 'Sultan Menyapa' bahwa hidup terus menerus mengisolasi diri tentu kurang bagus bagi kehidupan ekonomi. Bahkan kejenjutan sosial dan psikologis tentu akan menjadi masalah tersendiri. Karena itulah ajakan Presiden untuk hidup - hemat kita lebih tepat - berdampingan, sebab kalau berdamai bisa menimbulkan konotasi lain bagi warga yang tidak pas mengartikannya.

Apapun namanya, era normal baru mendatang tentu beda dengan era normal yang lalu. Era normal yang lalu, bisa terjadi jika vaksin Covid-19 ditemukan yang WHO menyatakan kemungkinan baru 2 tahun mendatang. Namun tentu saja kita tidak harus menunggu vaksin itu ditemukan, yang dilaksanakan sekarang adalah era dimana bisa menggerakkan kehidupan ekonomi dan sosial, agar bisa menggeliat lolos dari ancaman ekonomi negatif.

Menuju era tatanan baru tersebut tentu butuh sinergitas semua pihak, khususnya dalam pengaturan protokol kesehatan yang ketat. Kalau kita bicarakan Malioboro, tentu bukan hanya warga yang datang ber masker saja, namun fasilitas pendukung harus lengkap. Apalagi PKL sudah membuka lapaknya. Perilaku penjual, termasuk lesehan atau angkringan harus dikontrol apakah sudah menyediakan tempat cuci tangan, masker dan jaga jarak.

Kalau bicara Malioboro, tentu tak bisa lepas dengan hotel dan restoran. Sudah siapkah dengan tatanan normal baru mendatang? Di hotel lebih rumit lagi, karena bukan hanya untuk kamar, restoran tetapi juga karyawannya harus sudah disiapkan. Ini mutlak dilakukan. □ - a

Mengurus Covid-19 Berbasis Data

Arga Pribadi Imawan

spasial seolah hanya dipandang sebagai media informasi bukan sebagai basis data.

Studi terbaru dari Zhou, et. al (2020) menunjukkan bahwa data spasial berkontribusi besar dalam perumusan kebijakan penanganan Covid-19 di China. Elaborasi yang dilakukan menjelaskan tentang prioritas area dengan

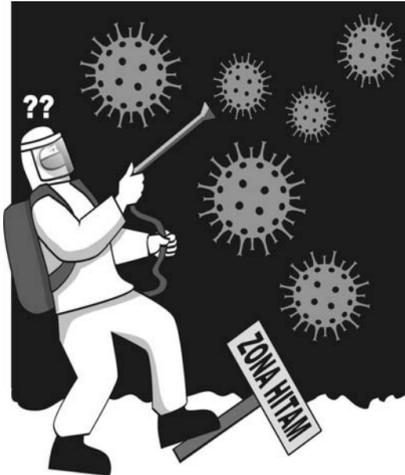
daerah tersebut. Disisi lain, *secondary core area* lebih longgar dan pemberian *supply* dibatasi.

Dorongan

Kebijakan berbasis data spasial perlu segera didorong untuk penanganan Covid-19 (Imawan, A, & Fathurrahman, R, *tba*). Terwujudnya langkah ini harus didorong oleh sikap inovatif dari kepala daerah untuk merumuskan kebijakan berbasis data dan harus menggirkan sejenak pertimbangan politis. Dalam jangka pendek, harapan akan muncul untuk menurunkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang, kebijakan berbasis data spasial dapat menjadi *grand design* penanganan Covid-19 tantangan bencana di masa depan.

Ragam pendapat telah dimulai dari kalangan akademisi, praktisi hingga tokoh keagamaan. Kendati telah mengantarkan beragam pendapat, akan tetapi opini yang dihasilkan mayoritas melihat kompleksitas permasalahan, dampak apa yang ditimbulkan oleh Covid-19, sikap apa yang perlu dilakukan warga dan seterusnya. Sangat sedikit pendapat yang mengutarakan solusi praktis penyelesaian. Pendapat dalam artikel ini mencoba menawarkan solusi sederhana penanganan Covid-19 yang bagi sebagian ahli cenderung kurang menjadi perhatian. □ - a

**Arga Pribadi Imawan, Peneliti Research Centre for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM.*



KR-JOKO SANTOSO

membaginya menjadi tiga kategori, *core area* (wilayah rawan), *primary core area* (wilayah bahaya) dan *secondary core area* (wilayah aman). Informasi ini berimplikasi besar bagi ketetapan kebijakan oleh pemerintah untuk menentukan jenis karantina wilayah.

Bagi wilayah *core area* dan *primary core area*, penegakan jenis karantina wilayah dilakukan dengan ketat ditandai dengan adanya mekanisme prosedur izin masuk dan keluar yang rumit. Arus lintas ke luar-masuk manusia ditutup. Penutupan yang dilakukan lantas tidak melepas tanggung jawab pemerintah untuk memberikan *supply* kebutuhan. Justru, pemerintah lebih fokus untuk pemberian *supply* kehidupan selama masa karantina di kedua

ANALOGI seragam sekolah menjadi gambaran cocok untuk melihat perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentang Covid-19. Lihat saja ketika menempuh Sekolah Dasar (SD) seluruh siswa dari kelas 1 hingga 6 diwajibkan menggunakan seragam putih dan celana/rok berwarna merah. Terlepas dari aspek fisik yang berbeda, umur yang berbeda dan pertambahan lainnya, seluruh siswa diwajibkan menggunakan seragam yang sama.

Pendapat ini muncul ketika kita membandingkan perumusan kebijakan yang dilakukan Provinsi Jawa Timur dengan DKI Jakarta. Kebijakan antara Provinsi Jawa Timur dengan DKI Jakarta tidak menunjukkan perbedaan (Imawan, A, & Fathurrahman R, *tba*). Dalam bahasa sederhana, kebijakan ini tidak mengandung solusi praktis penanganan Covid-19. Keduanya menerapkan kebijakan untuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penutupan jalan, penghentian transportasi umum dan seterusnya. Namun upaya ini tidak menunjukkan hal positif. Tanda-tanda kasus akan mereda tampaknya menjadi angan-angan dalam waktu dekat ini. Justru sebaliknya, kini sejumlah wilayah Jawa Timur berstatus daerah hitam.

Basis Kebijakan

Kondisi genting yang dialami Jawa Timur harus segera direspons. Era desentralisasi memungkinkan kepala daerah untuk mendorong kemandirian kepala daerah untuk berinovasi, semisal inovasi perumusan kebijakan. Solusi praktis penanganan ini terletak kepada kebijakan berbasis data spasial. Platform informasi spasial telah dilakukan oleh pemerintah pada level provinsi tentang penyebaran Covid-19. Sayangnya, informasi yang tersaji dalam bentuk yang sangat informatif tidak dijadikan sebagai basis untuk merumuskan kebijakan. Visualisasi

Memfasilitasi Arus Balik Santri

Fathorrahman Ghufro

simal. Padahal, tidak semua pesantren mempunyai asrama atau daya tampung santri yang memungkinkan untuk mengatur jarak fisik/sosial yang aman.

Namun demikian, untuk mengantisipasi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana tersebut, tentu masing-masing pesantren sudah berusaha maksimal untuk menjadwalkan ulang arus balik para santri. Bahkan, ada beberapa pesantren yang membuat aturan arus balik secara bergelombang agar bisa menerapkan pelaksanaan protap dan protokol kesehatan dengan baik selama masa-masa awal kembalinya para santri di pesantren. Akan tetapi, pesantren punya keterbatasan. Tak mudah jika harus melakukan sendiri.

Peran Pemerintah

Dalam kaitan ini, bila mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pasal 11 menegaskan: *pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi ponpes atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan*. Seharusnya pasal ini bisa dijadikan acuan pula bagi pemerintah untuk membantu pesantren di masa-masa pandemi. Walaupun secara eksplisit, UU ini tidak menyinggung persoalan pandemi di berbagai pasalnya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) tidak bisa membiarkan pesantren berjalan sendiri, menangani sendiri, dan memikirkan sendiri proses arus balik para santri dan pelak-

saan protap dan protokol kesehatan setibanya di pesantren. Pemerintah pusat dan pemda harus turun tangan bersama para pengasuh pesantren untuk membantu berbagai kendala yang dialami para santri.

Setidaknya, keterlibatan pemerintah dalam membantu pesantren di masa-masa pandemi ini menunjukkan bahwa negara ini mempunyai perhatian dan kepedulian untuk melayani pesantren. Dan, tidak sepatutnya pula bila pemerintah hanya mengurus sekolah formal yang berada di bawah naungan diknas maupun kemenag. Sementara pesantren dibiarkan letih sendirian.

Semoga, UU nomor 18 tahun 2019 tidak hanya menjadi ipepesan kosongi ketika pesantren mengalami ujian pandemi. Akan tetapi, UU ini betul-betul difungsikan sebagai jembatan kepedulian dan empati negara kepada pesantren. □ - a

**Wakil Katib PWNNU Yogyakarta. Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga.*

Pojok KR

Gubernur geram, banyak warga berkerumun tak indahkan protokol kesehatan.

*** Ingat, bahaya Covid-19 mengancam.**

Kamis besok, Kulonprogo akhirnya punya Wabup.

*** Selamat bertugas, jaga amanah rakyat.**

Harga gabah di tingkat petani naik.

*** Harapan baru bagi petani di era pandemi.**

Beraksi



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Bahaya Obesitas bagi Anak

ORANGTUA mana yang tidak senang melihat buah hatinya bertubuh gemuk menggemaskan, montok, berpipi tembem dan lucu pula. Tapi berhati-hatilah bahwa tubuh gemuk tidaklah selalu mengindikasikan sehat. Bisa jadi buah hati mengalami obesitas, yang saat ini menjadi perhatian serius di seluruh dunia, yang apabila dibiarkan berlarut-larut akan mengancam kualitas hidup dan perkembangan hidupnya kelak.

Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), bahwa seorang anak bisa dikatakan obesitas bila keadaan Indeks Massa Tubuh (IMT) mereka berada di atas persentil ke-95 pada grafik tumbuh kembang anak sesuai dengan jenis kelamin tentunya. Obesitas juga bisa diukur dari timbunan lemak di tubuhnya bila sudah melebihi 25% - 30% dari berat badan idealnya.

Lantas faktor apa saja yang bisa membuat anak mengalami obesitas? Salah satunya adalah makanan junk food yang sering dikonsumsi oleh anak-anak. Junk food adalah makanan dan minuman cepat saji yang mengandung garam, gula, lemak dan kalorinya tinggi tapi kandungan serat, vitamin, dan mineralnya sedikit. Selain itu junk food juga mengandung kolesterol dan zat adiktif sintesis seperti MSG dan pengawet. Mengonsumsi junk food yang berlebihan akan membuat tubuh terasa lemas karena mengalami kelebihan kalori dalam jangka waktu tertentu. Selain itu faktor genetik juga berpengaruh terhadap timbulnya obesitas apalagi bila dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak

sehat. Obesitas menimbulkan dampak buruk, mulai dari gangguan kesehatan, masalah emosional dan sosial sehingga membuat anak kesulitan bergerak dan tidak lincah.

Kurangnya aktivitas anak ikut berperan dalam peningkatan berat badan. Kecanggihan teknologi di era modern membuat anak suka berlama-lama di depan gadget, menghabiskan waktunya hanya dengan menonton televisi ditambah dengan beragamnya game online yang membuat anak semakin betah duduk sambil ngemil makanan dengan bumbu/penyedap masakan. Maka kegemukan tak bisa terhindarkan lagi.

Menurut penelitian anak-anak yang mengalami obesitas akan cenderung mudah terserang asma dengan frekuensi lebih dari satu kali serangan dibanding dengan anak normal. Sebagai orangtua yang cerdas, tidak selayaknya memberikan dan mengenalkan junk food pada anak-anaknya. Mulailah dengan makanan sehat yang dimasak sendiri di rumah dengan tidak menambahkan bumbu penyedap. Konsumsi sayur mayur dan buah sebagai gaya hidup masa kini, rajin olahraga serta beribadah dengan khusus adalah kebiasaan sehat yang harus kita terapkan di rumah. Karena pola rutin dengan memberikan junk food kepada anak akan membawa dampak negatif bagi kesehatan maupun psikologis. Mari kita jaga kesehatan keluarga tercinta. □ - a

*Nur Rahmah Irdianawati SE
Staff Sub Bag Keuangan
RSUD Sleman*

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA, Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Perencanaan:** Ngabdul Wakti. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H Chaidir, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SILkom, Ardhi Wahdan. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSN, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'...Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman 1: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Pemimpin Redaksi: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Dryanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Suniaryasih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.